

BAB II

DINAMIKA KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan dinamika Konflik Laut Tiongkok Selatan dari segi sejarah. Penjelasan tersebut mencakup sejarah klaim Negara-negara bersengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan yaitu RRT, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Dalam perkembangannya Laut Tiongkok Selatan tak kunjung menemui titik temu, dan terdapat bermacam dinamika yang ada di dalamnya. Dalam bab ini juga akan dijelaskan pendekatan RRT terhadap Negara yang bersengketa lainnya. Selain itu dalam bab ini menjabarkan peran ASEAN dalam menangani konflik Laut Tiongkok Selatan mengingat konflik tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan regional di Asia Tenggara. ASEAN melakukan berbagai cara mulai dari inisiasi penyelesaian konflik, hingga terbentuk DOC, namun DOC dirasa kurang mampu untuk menyelesaikan konflik maka ASEAN berupaya untuk menciptakan COC yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tegas, namun gagal terbentuk dikarenakan adanya sikap penolakan dari Kamboja. Sikap penolakan Kamboja dilakukan tidak terlepas dari adanya pendekatan RRT yang akan di jelaskan pada bab ini, dan yang terakhir pada bab ini akan menjelaskan dampak dari penolakan Kamboja tersebut terhadap penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

2.1. Sejarah Konflik di Laut Tiongkok Selatan

Salah satu konflik yang terus berkembang dan semakin meningkat ketegangannya adalah di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan merupakan laut yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. Laut Tiongkok Selatan merupakan 2,5 % dari Luas laut dunia secara keseluruhan. Membentang dari selat Malaka sampai ke selat Taiwan, dikelilingi oleh negara-negara ASEAN, di utara berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan, barat berbatasan dengan Vietnam Kamboja dan Thailand, Selatan berbatasan dengan Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Singapura, di timur berbatasan dengan Filipina.⁴⁴

Di bagian timur, garis batas Laut RRT Selatan dari Tanjung Sambar melalui pantai barat Kalimantan ke Tanjung Sampan mangio, menuju garis barat Pulau Bancalan dan Tanjung Buliluyan di selatan Palawan, kemudian ke Pulau Mindoro, dan melewati barat laut Pulau Lubang dan Pulau Luzon (14°08"LU), menuju Pulau Balin tang (20° LU) dan Pulau Y"Ami (21°05"LU) ke arah selatan Taiwan. Di bagian utara, garis batas Laut RRT Selatan dari Fuki Kaku bagian utara Taiwan Kiushan Tao (pulau Turnabout) di selatan Haitan Tao (25°25"LU) dan kemudian ke utara pantai Fukien (25°24"LU). Di bagian barat, garis barat Laut RRT Selatan sepanjang daratan RRT dan Vietnam, dan di sebelah selatan

⁴⁴ Akmal and Pazli Pazli, "Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan Pada Tahun 2009-2014," *International Society* 3, no. 1 (2017), hal. 2

dibatasi dengan teluk Siam dan sepanjang garis pantai timur semenanjung Malaysia.⁴⁵

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah sengketa klaim wilayah yang melibatkan beberapa Negara seperti RRT, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Konflik sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan masih menjadi permasalahan isu konflik yang belum terselesaikan. Hal itu setidaknya ada dua alasan sehingga konflik Laut Tiongkok Selatan dapat terjadi secara berlarut-larut. Yang Pertama, potensi besar yang dimiliki oleh Laut Tiongkok Selatan. Potensi Laut Tiongkok Selatan yang sangat besar terdiri dari aspek geografis, ekonomi (SDA). Hal itu sangat wajar jika wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi perebutan banyak Negara untuk dijadikan sumber kekuasaan dan *power*. Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai aspek. Secara geografis, perairan Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai strategis sebagai jalur pelayaran internasional perdagangan paling sibuk didunia dari segi lalu lintas. Jalur pelayaran perdagangan di Laut Tiongkok Selatan menghubungkan Negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah serta sebagai jalur perdagangan dalam kawasan Asia Pasifik dengan Samudra Hindia dan juga Australia.⁴⁶ Dalam aspek ekonomi, Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi yang sangat besar dalam Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung didalamnya. Kawasan ini diperkirakan memiliki potensi sumber daya perikanan yang berlimpah dan cadangan minyak dalam jumlah besar.

⁴⁵ E. Estu Prabowo, "*KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konflik Di Laut Tiongkok Selatan)*", JURNAL KETAHANAN NASIONAL, Vol. 19, No. 3, hal. 119

⁴⁶ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, CSIS, 1997, hal. 13

Menurut data, cadangan minyak terbukti (*proven oil reserve*) di Laut Tiongkok Selatan sebesar tujuh juta barel dan kapasitas produksi mencapai 2,5 juta barel perhari. Cadangan itu belum meliputi wilayah perairan di sekitar Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel, karena sejauh ini eksplorasi di kedua perairan kepulauan sengketa tersebut belum dilaksanakan.⁴⁷

Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai Laut Tiongkok Selatan. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 milyar barel dan diseluruh Laut Tiongkok Selatan sebanyak 213 Milyar barel. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan tersebut merupakan gas alam. Badan Informasi Energi AS memperkirakan cadangan gas alam dan minyak di Laut Tiongkok Selatan merupakan terbanyak ketujuh di dunia. Kawasan tersebut diperkirakan memiliki 190 triliun kaki gas alam. Badan independen itu juga menaksir ada 11 miliar barel minyak tersembunyi di laut Tiongkok Selatan.⁴⁸

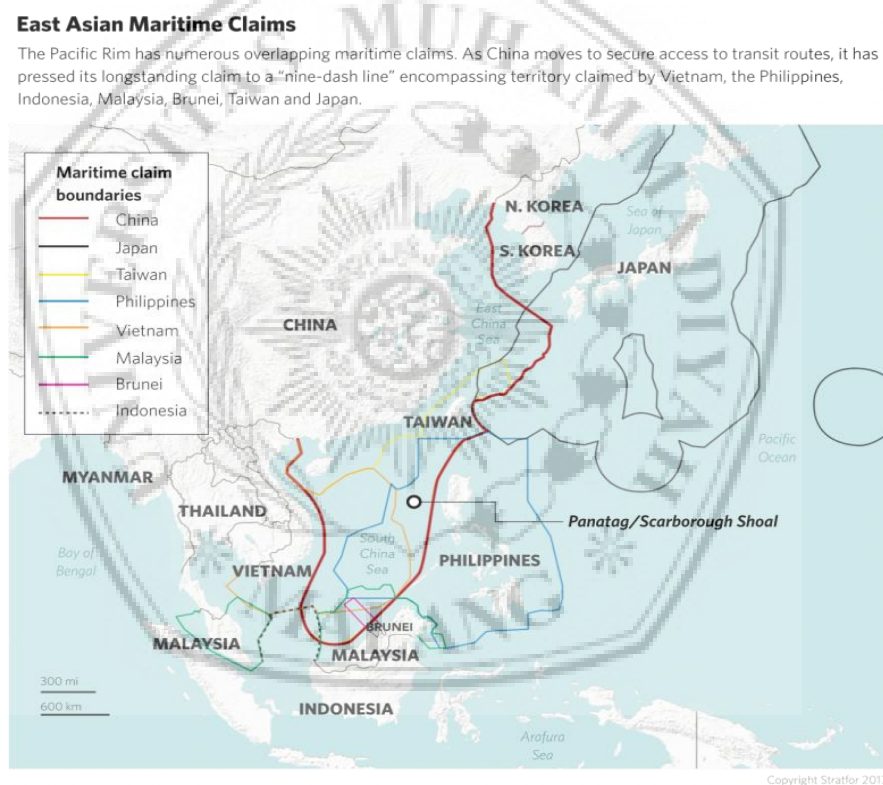
Adapun alasan yang Kedua adalah adanya perbedaan yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan. Pihak RRT mengklaim berdasarkan klaim historis sedangkan Negara ASEAN berdasarkan UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut.

Klaim pertama kali di Laut Tiongkok Selatan terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh RRT yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda Sembilan Garis

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Akmal Akmal and Pazli Pazli, "Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan Pada Tahun 2009-2014," Jom Fisip Volume 2 No. 2 Oktober 2015, Universitas Riau, hal. 5

Putus-putus (*Nine Dash Line*) yang Departemen Geografi Kementerian Dalam Negeri. Klaim sepihak yang dilakukan oleh RRT bertentangan dengan batas wilayah Negara lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.⁴⁹ Hingga sekarang masih terjadi pertikaian atau saling klaim antara negara yang mengaku memiliki dasar kepemilikan berdasarkan batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Adapun peta dari klaim masing-masing pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan sebagai berikut⁵⁰:



Gambar 2.1. Peta Klaim Wilayah di Laut Tiongkok Selatan

Dalam peta tersebut dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan dasar klaim wilayah yang saling tumpang tindih. Hal itu yang menjadi permasalahan dalam

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Diakses dalam https://fairchild-mil.libguides.com/South_China_Sea diakses pada 2 Mei 2018 pada 18.45 Wib

sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Klaim perbatasan yang tumpang tindih tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN dan RRT. Pihak RRT mengklaim berdasarkan klaim historis penemuan dan kependudukan di wilayah tersebut. RRT dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Dalam sejarah RRT, sejak 2000 tahun yang lalu banyak nelayannya yang telah melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. Beijing juga menegaskan bahwa negara yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah RRT dengan didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Bagi RRT, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik dan pertahanan keamanannya.⁵¹

Sedangkan di pihak lain Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam menggunakan dasar Hukum Konveksi Laut UNCLOS/ perbedaan sumber dasar klaim menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim wilayah di laut Tiongkok Selatan. Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa Negara di sekitar perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, perairan territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan laut lepas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara-negara pengklaim (*claimant state*) menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara

⁵¹ *Ibid*, hal. 3

unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Hal inilah yang di antaranya memicu sengketa klaim wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan. Negara yang menggunakan UNCLOS dalam pengklaimannya adalah Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.⁵² Jadi perbedaan dasar dalam menentukan batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik di wilayah tersebut.

Sejak pertama kali konflik di Laut Tiongkok Selatan dimulai pada tahun 1947 hingga sekarang masih belum terselesaikan. ASEAN sebagai organisasi regional berupaya untuk andil peran dalam menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Sejauh ini upaya konkrit yang dilakukan oleh ASEAN adalah kesepakatan antara ASEAN dan RRT pada tahun 2012 untuk menyepakati *Declaration of Conduct* (DOC). DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya. Namun, Pada April 2010, RRT malah mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Tiongkok Selatan. Keluarnya regulasi tersebut jelas telah mencoreng kesepakatan DOC. Namun yang menjadi masalah adalah DOC tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tegas, hal itu terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Berdasarkan hal tersebut ASEAN berupaya untuk menciptakan COC (*Code of Conduct*) yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.

⁵² Akmal Akmal and Pazli Pazli, "Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan Pada Tahun 2009-2014," Jom Fisip Volume 2 No. 2 Oktober 2015, Universitas Riau, hal. 2

Sehingga, jika ada pihak yang melanggar dapat diberi sanksi yang tegas. COC berusaha dibentuk pada KTT ASEAN pada tahun 2012, namun sikap penolakan yang dilakukan oleh Kamboja yang bertindak sebagai tuan rumah pada KTT ASEAN tersebut pada proses pembentukan COC pada konflik sengketa pada Laut Tiongkok Selatan.⁵³ Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh Kamboja menjadikan dinamika konflik sengketa di Laut Tiongkok Selatan menjadi semakin rumit dan tidak menemui titik temu.

2.2. Posisi Klaim RRT

Awal mula terciptanya konflik sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan dimulai dari Klaim dari RRT atas beberapa wilayah di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947. Klaim RRT terhadap Laut Tiongkok Selatan didasari oleh peta yang disebut Sembilan Garis Putus-putus (*Nine Dash Line*) yang didasari oleh fakta sejarah masa lampau yang meyakini bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan RRT.⁵⁴ Konflik sengketa di Laut Tiongkok Selatan mengalami fluktuasi dalam intensitasnya, dalam artian sering memanas dan mereda sewaktu-waktu. Konflik sengketa di Laut Tiongkok Selatan kembali memanas pada tahun 1974 dan 1992 ketika RRT mengklaim Kep. Spratly dan Paracel.⁵⁵ Tentu klaim wilayah yang dilakukan oleh RRT menuai reaksi yang

⁵³ Rizal Sukma, *ASEAN dan Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Kompas diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.RRT.Selatan> diakses pada 20 Maret 2017 pada 18.45 Wib

⁵⁴ Fitra Deni dan Lukman Sahri, "Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Klaim RRT Atas Zona Eksklusif Indonesia di Laut Natuna", *International & Diplomacy* Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 1

⁵⁵ Try Satria Indrawan Putra, Adjie Samekto & Soekotjo Hardiwinoto, "Reklamasi Pulau di Laut Tiongkok Selatan: Suatu Analisis terhadap Status Penambahan Wilayah dan Dampak terhadap jalur Pelayaran Internasional", *Diponegoro Law Review*: Vol. 4, No. 2, Tahun 2016, hal. 2

keras oleh beberapa Negara yang bertetangga dengan Laut Tiongkok Selatan, mengingat klaim yang dilakukan oleh RRT tersebut terjadi tumpang tindih dengan Negara disekitar wilayah Laut Tiongkok Selatan seperti Negara Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia.⁵⁶

Klaim RRT menegaskan bahwa wilayah yang mereka klaim di wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari kekuasaan mereka yang di dukung dengan bukti-bukti sejarah, seperti ditemukannya bukti arkeologis dari dinasti Han (206 – 220 SM).⁵⁷ RRT mengklaim berdasarkan fakta-fakta sejarah seperti bahwa wilayah Laut Tiongkok selatan merupakan daerah kekuasaan kerajaan Dinasti Han yang digunakan sebagai jalur perdagangan RRT menuju India, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan-kerajaan di pulau Jawa di Indonesia. Hal itu didukung dengan klaim RRT banyaknya pelabuhan yang diciptakan oleh mereka di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Selain itu banyak peninggalan prasasti dan arsitektur kuno dari budaya Negara RRT yang ditemukan di wilayah sekitar pulau Sparty dan Paracel, meskipun klaim tersebut masih menuai pro kontra.⁵⁸

Selain dasar penentuan wilayah yang berbeda yang di gunakan oleh RRT (Sembilan Garis Putus-putus) dengan Negara yang bersengketa lainnya yang menggunakan dasar UNCLOS 1982. RRT dalam klaimnya sangat agresif sehingga menimbulkan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan RRT terkait klaim nya di wilayah Laut Tiongkok Selatan cenderung provokatif.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Ties Kindyana, *Kebijakan Jepang dalam Mengamankan Kepentingan terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, hal. 32

⁵⁸ Michael Flecker, "Early Chinese Voyaging in South China Sea: Implications on Territorial Claims, *Journal of Maritime Studies and National Integration*, Vol. 1 No.1, Hal. 10 – 14

Sebut saja ketika kebijakan RRT melakukan instalasi dan pembangunan tempat singgah serta istirahat para pelaut/ pencari ikan dari RRT di gugusan karang di Mischief Reefs (Spratly dan Paracel) tahun 1995 yang merupakan wilayah kekuasaannya Filipina.⁵⁹ Selain itu di tahun yang sama ada instalasi militer yang dilakukan RRT di wilayah Spratly dan Paracel yang menuai protes keras dari pemerintahan Filipina. Meskipun tidak menimbulkan konfrontasi secara militer, tindakan RRT tersebut menuai protes dari perwakilan diplomatik pemerintah Filipina. Pada saat itu bias dikatakan hubungan bilateral antara RRT – Filipina terganggu akibat isu sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan.⁶⁰

Selain Filipina, Negara yang paling terkena dampak dari klaim sepihak yang dilakukan oleh RRT adalah Negara Vietnam. Vietnam dalam klaim wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 tentang ZEE dimana di Kep. Paracel dan Spratly merupakan bagian dari wilayah Vietnam, jika mengikuti ketentuan dari UNCLOS 1982. Namun klaim yang dilakukan RRT tentunya merugikan pihak Negara Vietnam. Sikap konkrit untuk menanggapi klaim yang dilakukan oleh RRT adalah terciptanya undang-undang tentang batas nasional pada pasal 1. Dimana ditegaskan kembali bahwa Vietnam berdaulat atas Kep. Paracel (Hong Sa) dan Kep. Spratly (Truong Sa).⁶¹

Selanjutnya, yang menjadi permasalahan setelah klaim sepihak yang dilakukan oleh RRT adalah tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT demi

⁵⁹ Mark Anthony M. Velasco, “ *Philippines – China Relations: The Case of the South China Sea (Spratly Islands) Claims*”, Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research P-ISSN 2350-7756 | E-ISSN 2350-8442 | Volume 2, No. 6 | December 2014, hal. 81

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Akbar Fitriyasa, “*Kerjasama Vietnam dengan Amerika Serikat Dalam Mengeleloa Ancaman Keamanan Laut Tiongkok Selatan Tahun 2011*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hal. 21

kepentingan pribadinya. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT sangat rentan menyebabkan sengketa konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi semakin memanas. Dikarenakan, reklamasi tersebut menjadi tumpang tindih dengan territorial Negara yang berada disekitar Laut Tiongkok Selatan. Reklamasi menjadi sebuah permasalahan. Dikarenakan, belum ada aturan yang jelas terkait aturan-aturan reklamasi dalam UNCLOS 1982. Meskipun begitu ada beberapa pasal yang dapat diinterpretasikan dalam proses reklamasi yaitu:⁶²

1. Pasal 60 Ayat 8 UNCLOS 1982 menyebutkan mengenai struktur, reklamasi, atau pulau buatan tidak akan mengubah garis batas territorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jika mengacu pada pasal ini maka batas wilayah hanya diukur dari pulau terluar yang tercipta secara alamiah/ natural dan bukan buatan. Jadi dapat dikatakan bahwa reklamasi yang dilakukan RRT di Laut Tiongkok Selatan seharusnya tidak mempengaruhi batas wilayah territorial yang dimiliki oleh RRT di wilayah Laut Tiongkok Selatan.
2. Pasal 12 UNCLOS 1982 pelabuhan atau fasilitas yang digunakan untuk memuat atau aktivitas perkapalan lainnya di bangun di wilayah territorial Negara. Jadi instalasi pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh RRT secara tidak langsung mengukuhkan klaim bahwa RRT memiliki kedaulatan territorial di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan.
3. Pasal 15 UNCLOS 1982. Pasal 15 membahas mengenai penetapan garis batas territorial laut antara Negara-negara yang pantainya saling

⁶² Try Satria Indrawan Putra, Adjie Samekto & Soekotjo Hardiwinoto, Op. Cit., hal. 4 - 5

berhadapan atau berdekatan. Bahwa untuk menetapkan batas laut teritorialnya, maka tidak ada satupun Negara yang menentukan secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan pihak yang garis batasnya bersinggungan. Namun hal itu tidak berlaku atas alasan hak historis atau keadaan khusus lainnya.

Di samping masih belum adanya aturan yang jelas terkait aturan reklamasi. Pihak RRT terus melakukan reklamasi di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Reklamasi yang dilakukan oleh RRT menuai banyak interpretasi dan reaksi, pasalnya belum ada aturan atau pasal yang spesifik yang mengatur terkait reklamasi dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang notabene merupakan hukum utama yang berlaku dalam dunia internasional terkait Hukum Laut itu sendiri. Disatu sisi masih belum jelasnya aturan terkait reklamasi, pihak RRT terus melakukan reklamasi. Tercatat dari 2013 RRT sudah melakukan perluasan wilayah dengan cara reklamasi seluas 1200 hektar di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang bersinggungan dengan beberapa Negara lainnya. Ada beberapa pulau yang di klaim oleh RRT namun yang menjadi konflik perebutan wilayah yang utama adalah Kep. Spratly dan Paracel.⁶³

2.3. Posisi Klaim Negara Asia Tenggara (Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam)

Klaim sepihak yang dilakukan oleh RRT di Laut Tiongkok Selatan di tentang oleh beberapa Negara Asia Tenggara yang terkena dampak dari klaim

⁶³ *Ibid.*, hal. 5 – 7

yang dilakukan oleh RRT, seperti Negara Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Setiap Negara yang bersengketa dalam klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan memiliki landasan klaim masing-masing sebagai berikut.

2.3.1. Klaim Filipina

Filipina secara geografis adalah Negara yang paling dekat wilayah yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan. Klaim yang dilakukan Filipina atas wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan tidak terlepas dari segi historis. Pada masa kolonisasi Filipina merupakan jajahan Spanyol dan berikan kekuasaannya kepada AS pada tahun 1898 berdasarkan *Treaty of Paris*. Di waktu bersamaan diterbitkannya cakupan wilayah Filipina yang terdiri dari 7.107 pulau termasuk Kep. Spratly dan Kep. Paracel didalamnya dan tidak mendapatkan protes dari Negara manapun.⁶⁴

. Selain segi historis Filipina juga menguatkan klaimnya berdasarkan peraturan UNCLOS 1982 tentang ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi) yaitu batas wilayah Negara pantai adalah 200 mil dari pulau terluar. Filipina melakukan klaim kembali pada tahun 1988 dengan sebutan Filipina "*Internal Water*".⁶⁵ Filipina menentukan batas kontinental ZEE yaitu batas wilayah terluar 200 mil dari pulau terluar pada tahun 1994 yang berdasarkan pasal 76 UNCLOS 1982 Tentang Negara Kepulauan. Dasar klaim Filipina atas wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan didasari oleh wilayah yang disebut *Scarborough Shoal* yaitu merupakan gugusan karang seluas 60 mil yang merupakan hasil perdagangan antara Spanyol

⁶⁴ Mark E. Rosen, "*Philippines Claim in the South China Sea: A Legal Analysis*", A CNA; Occasional Paper, hal. 5

⁶⁵ *Ibid*

dengan *East India Company* pada tahun 1748.⁶⁶ Map dari *Scarborough Shoal* diterbitkan oleh kolonial Spanyol dan dijadikan pedoman oleh Filipina untuk melakukan klaim di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Filipina mengklaim telah menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur Kep. Spratly yang disebut sebagai Kelayaan. Tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau Panata. Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara manapun.⁶⁷ Klaim Filipina berfokus pada wilayah yang disebut dengan *Scarborough Shoal & Kalayan Island Group* (KIG).

2.3.2. Klaim Vietnam

Selanjutnya klaim Negara Vietnam atas Laut Tiongkok Selatan didasari pada klaim historis dan UNCLOS 1982. Vietnam mengklaim bahwa mereka sudah menduduki (Hoang Sa) Kep. Paracel dan (Truong Sa) Spratly semenjak abad ke-17 pada Dinasti Kerajaan Nguyen dan Tay Son sebelum RRT masuk di wilayah tersebut.⁶⁸ Hal tersebut ditegaskan pada *White Paper* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 1988. Kependudukan Vietnam pada abad ke-17 didasari oleh catatan peta yang dibuat Do Ba Cong Dao pada tahun 1834. Dalam peta yang berjudul Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Doc Thin (Peta Ruti dari Ibukota Keempat Penjuru), hal tersebut didasari pada kekuasaan pada

⁶⁶ *Ibid*, hal. 8

⁶⁷ Tues Kindyana, "*Kebijakan Jepang dalam Mengamankan Kepentingan terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan*", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, hal. 32 – 35

⁶⁸ Nguyen Huu Tuc, "China's Historical Evidence: Vietnam's Position on South China Sea", RSIS Commentary, No.170, 2014

dinasti Nguyen pada tahun 1802.⁶⁹ Adapun klaim dokumen-dokumen historis dari Dinasti Nguyen yang mengklaim memiliki hak kekuasaan atas wilayah di Kep. Laut Tiongkok Selatan diantaranya dokumen *The Early Chapter of Dai Nam* (1600-1775), *The Collection of the South's Road Map* (1630-1653), *The Map for the Pacification of the South in the Giap Ngo Year* (1774), *Miscellany on the Pasification at the Frontier* (1776), *Classified Rules of the Dinasties* (1821), *The Authentich Writing on Dai Nam* (1821-1844), *The Complete Map of the Unified Dai Nam* (1838), *Geography of The Viet Empire* (1833), *The Main Chapter of the Chronicles of Dai Nam* (1848), *Outline of the Chronicles of The Viet History* (1876).⁷⁰

Selain itu Vietnam juga menggunakan dasar klaim historis lainnya. Pada masa Perang Dunia II wilayah Laut Tiongkok Selatan dijadikan pos-pos penjagaan angkatan armada laut Negara-negara kolonial. Negara yang pertama mengklaim dan menduduki wilayah tersebut adalah Perancis pada 1930 untuk mencegah perluasan kekuasaan Jepang pada saat itu. Pada saat Perang Dunia II Vietnam menduduki Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly untuk melakukan latihan militer bersama Perancis yang merupakan Negara penjajah Vietnam pada masa itu.⁷¹ Namun setelah Perang Dunia II berakhir Perancis mengabaikan wilayah tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir diciptakan Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951. Dalam

⁶⁹ Widia Dwita Utami, *Upaya Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dalam Meredam Konflik atas Sengketa Spratly Island*, Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, hal. 29

⁷⁰ Raul Pete Pedrozo, "China Versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claim in the South China Sea", CNA Occasional Paper, 2014, hal. 38

⁷¹ *Ibid.*, hal. 26

perjanjian tersebut Perancis memberikan hak kekuasaan atas wilayah Spratly dan Paradel kepada Vietnam.⁷²

Selain itu klaim Vietnam juga berdasarkan UNCLOS 1982 tentang ketentuan ZEE. Vietnam tercatat setidaknya memiliki 5 wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Sengketa-sengketa tersebut diantaranya: Teluk Tonkin dengan Pulau Hainan dengan RRT; Kepulauan Paracel dekat dengan RRT dan Taiwan; Kepulauan Spratly dekat dengan RRT, Malaysia, Filipina, Brunei dan Taiwan. Dalam upaya klaim wilayah sengketa tersebut Vietnam melakukan beberapa upaya yaitu diantaranya mengadakan Resolusi Majelis Nasional yang menyatakan kedaulatan laut mereka pada Kep. Paracel dan Spratly pada tahun 1994.⁷³ Sedangkan klaim yang dilakukan oleh Malaysia dan Brunei berdasarkan peraturan UNCLOS 1982 tentang ketentuan ZEE.

2.3.3. Klaim Malaysia dan Brunei Darussalam

Namun, klaim Malaysia dan Brunei cenderung lemah dan tidak menimbulkan konfrontasi. Berbeda dengan Filipina dan Vietnam yang sering menimbulkan situasi yang cenderung konfrontasi dan berpotensi untuk mengarah ke sebuah konflik yang lebih besar. Sebut saja konflik yang terparah konfrontasi Vietnam – RRT pada tahun 1988. Pada 1988 terjadi ketegangan di kepulauan Spratly antara Tiongkok dan Vietnam. Dua puluh kapal perang Tiongkok yang sedang berlayar di LCS menghadang Angkatan Laut Vietnam, sehingga terjadi bentrokan di Karang Johnson Selatan dan mengakibatkan hilangnya 74 tentara Vietnam.²⁴ Tiongkok juga telah melakukan pemutusan kabel seismik eksplorasi

⁷² Widia Dwita Utami, *Op.Cit.*

⁷³ Akbar Fitriyasa, *Op.Cit.*,

minyak kapal Binh Minh 02 dan Viking II yang disewa Petro Vietnam masing-masing pada 26 Mei 2011 dan 9 Juni 2011, yang kemudian diprotes keras oleh Vietnam.⁷⁴

Pihak RRT dan beberapa Negara Asia Tenggara saling mengklaim wilayah dalam Laut Tiongkok Selatan. Namun, ada perbedaan dalam klaim yang mereka lakukan yaitu sikap RRT yang cenderung agresif dalam melakukan klaim yang mengarah penggunaan kekuatan militer. Hal itu terlihat dengan sikap RRT yang membangun pangkalan militer di wilayah sengketa, membangun landasan pacu udara, dan fasilitas pertahanan di wilayah sengketa. Selain itu RRT melarang diikuti mengancam agar pihak lain tidak beroperasi di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Tindakan RRT tersebut menuai reaksi keras dari pemerintahan Filipina pasalnya Kep. Sparty secara geografis lebih dekat dengan Filipina dibanding dengan RRT. Untuk menindak lanjuti tindakan sepihak RRT tersebut, Filipina mengajukan sengketa tersebut ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Deen Hag. Hasil dari pengadilan PCA memenangkan pihak Filipina namun pihak RRT tidak menerima keputusan yurisdiksi dari PCA tersebut. Hal itu menunjukkan sikap keengganan RRT untuk menggunakan landasan hukum internasional untuk menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan.⁷⁵

⁷⁴ Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, "Asean Dan Isu Laut Tiongkok Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur", Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 107

⁷⁵ Garry Gumelar Pratama, "Konflik Vs Kooperasi: Upaya Penyelesaian Konflik di Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN ke iklim Ekonomi Global", Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016, hal/ 27 – 29

2.4. Posisi ASEAN dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan

Konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan sangat berpotensi untuk menjadi konflik yang lebih besar dan berbahaya yang dapat mengancam kestabilan keamanan di kawasan regional Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara merasa perlu untuk andil peran dalam penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan.

ASEAN menyatakan sikapnya atas sengketa-sengketa di Laut RRT Selatan, yaitu memandang bahwa Laut RRT Selatan harus dijadikan peluang adanya kerjasama untuk kepentingan bersama daripada sebagai sumber konflik; para pihak dari sengketa yang belum selesai harus menghindari tindakan yang dapat mengganggu perdamaian, keamanan, kebebasan, dan keselamatan navigasi dari Laut RRT Selatan, ASEAN dan RRT yakin bahwa sengketa territorial di Laut RRT Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN dan RRT jangan sampai merusak kerjasama ASEAN-RRT, serta komitmen ASEAN-RRT untuk tidak menggunakan kekerasan pada tahun 1997 tetap berlaku. ASEAN memiliki pandangan bahwa RRT juga memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan setiap konflik dan sengketa yang terjadi di laut Tiongkok selatan secara damai dan menggunakan tindakan yang non-kekerasan yang mana sejalan dengan nilai-nilai TAC ASEAN⁷⁶ yang dianut oleh negara-negara di Asia Tenggara.⁷⁷ Adapun

⁷⁶ TAC ASEAN merupakan sebuah kerjasama yang disepakati oleh seluruh anggota ASEAN yang diterapkan serta di sepakati untuk di jadikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman negara-negara ASEAN dalam berbangsa dan bernegara, yang mana terbentuknya TAC itu sendiri didasari oleh kesadaran akan kesamaan sejarah, pengalaman serta tujuan cita-cita setiap negara di Asia Tenggara itu sendiri. TAC itu terdiri dari prinsip-prinsip seperti: saling menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persamaan, keadilan, batas negara, serta identitas nasional setiap negara, hak setiap negara untuk bebas dari intervensi atau paksaan dari pihak asing, *non-interference* masalah domestik antar negara ASEAN, penyelesaian perbedaan dan sengketa secara damai, penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer dan ancaman. Baca lebih lanjut, ASEAN,

upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dalam menangani konflik di Laut Tiongkok Selatan akan di bahas dalam pembahasan bab berikutnya.

2.4.1. Upaya ASEAN dalam Menangani Konflik di Laut Tiongkok Selatan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan masih tetap menjadi masalah yang mempengaruhi keamanan kawasan Asia Tenggara dan menghambat upaya ASEAN untuk menciptakan sebuah tata regional yang stabil. Jika konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka akan berakibat terhambatnya pembangunan ekonomi, dan pertentangan yang tajam antar negara ASEAN sendiri yang tentunya akan mengancam tatanan kerjasama regional serta mengancam persatuan ASEAN yang telah dibina selama ini. Mengingat konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak menemui titik temu, ASEAN sebagai organisasi regional berusaha untuk mengambil peran untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui cara multilateral. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh ASEAN untuk memberikan solusi terhadap penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN untuk mengurangi konflik ketegangan atas Laut China Selatan dan *Spratly Islands* pada khususnya, baik dengan dikeluarkannya suatu dokumen dan juga melalui perundingan. ASEAN telah membahas masalah Laut China Selatan pada Senior Official Meetings, ASEAN Ministerial Meetings, dan Asean Regional Forum. Jalur informal juga

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976, dalam, <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>.

⁷⁷ Widia Dwita Utami, *Upaya Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dalam Meredakan Konflik atas Sengketa Spratly Island*, Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, halm. 99

telah ditempuh melalui Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut China Selatan (*Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea*) yang diselenggarakan atas inisiatif Indonesia sejak tahun 1990. Peran ASEAN disini lebih bersifat mendinginkan ketegangan sekaligus aktif mencari solusi diplomasi Laut China Selatan. Hal ini didasarkan norma ASEAN yang tidak menginginkan kekerasan dan mendorong *peaceful joint declaration* dalam menyelesaikan konflik. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai upaya-upaya ASEAN tersebut.⁷⁸

Sikap ASEAN pertama kali atas sengketa *Spratly Islands* adalah mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea* yang ditandatangani enam Menteri Luar Negeri negara ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) pada 22 Juli 1992 di Manila, Filipina. Deklarasi ini menjadi langkah awal dalam mengurangi konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Lebih lanjut, dikeluarkannya deklarasi ini merupakan bentuk solidaritas ASEAN terhadap perdamaian dengan melakukan pendekatan konstruktif bagi penyelesaian masalah di Laut China Selatan. Deklarasi ini juga merupakan bentuk perhatian ASEAN atas meningkatnya tensi antara China dan Vietnam setelah Creston Energy Cooperation memperoleh izin untuk mengeksploitasi minyak di Vanguard Bank yang berada pada Landas Kontinen Vietnam dan China yang mengeluarkan Law of Teritorial Sea pada Februari 1992 yang menyatakan bahwa China memiliki kedaulatan absolut di Laut China Selatan termasuk di *Spratly Islands*. Dalam deklarasi tersebut, para

⁷⁸ *Ibid*, hal. 100

Menteri Luar negeri ASEAN menyadari betapa sensiifnya isu kedaulatan dan yurisdiksi di Laut China Selatan bagi negara-negara yang terlibat dan menilai bahwa setiap perkembangan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai akan langsung berkibat bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Para menteri tersebut menekankan perlunya menyelesaikan seluruh sengketa kedaulatan dan yurisdiksi di Laut China Selatan dengan cara-cara damai dan tanpa menggunakan kekerasan, dan mendesak seluruh pihak yang bersengketa untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan demi menciptakan iklim positif bagi penyelesaian akhir dari semua sengketa. Deklarasi ini juga mendesak negara-negara yang bersengketa untuk mengusahakan pengembangan bersama sementara mengesampingkan masalah kedaulatan, serta menyatakan perlunya pengaplikasian prinsip-prinsip dari TAC sebagai dasar dari pembuatan *Code of Conduct in the South China Sea*.⁷⁹

Selanjutnya upaya ASEAN yang paling konkrit adalah sebuah kode etik yang disepakati oleh kedua pihak. ASEAN mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South RRT Sea* yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Sepuluh tahun kemudian, bersama RRT, ASEAN mengeluarkan *Declaration on Conduct of the Parties in the South RRT Sea (DOC)* yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan RRT untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut RRT Selatan, penyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi

⁷⁹ *Ibid*, hal. 101

konflik. DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya.⁸⁰

Pembahasan tentang DOC regional mula-mula dibahas secara intensif dalam *track-2 Workshop Series* tentang Pengelolaan Konflik Potensial di Laut Tiongkok Selatan yang dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 1991. Awalnya, rancangan DOC ini akan diajukan dalam Deklarasi ASEAN pada tahun 1992, tetapi baru secara resmi disahkan pada *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-29 di Jakarta tahun 1996. Tujuan DOC adalah untuk menjadi dasar bagi stabilitas jangka panjang di LCS dan mendorong pengertian di antara negara-negara bersangkutan. Pada tahun 1999 negara-negara ASEAN mendekati untuk memulai perundingan mengenai DOC bagi LCS. Namun demikian, setelah berunding selama lima tahun tidak tercapai kesepakatan tentang DOC antara ASEAN dan RRT di Laut Tiongkok Selatan. ASEAN dan RRT hanya sampai pada suatu dokumen politik. Baru pada tanggal 2 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.⁸¹

ASEAN dan RRT menandatangani *Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). DoC ini mengungkapkan tiga tujuan: (1) mendorong pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*, CBM), (2) kerja sama di bidang kelautan, dan (3) mempersiapkan pembahasan dan penentuan suatu Coc yang formal dan mengikat. Kemudian dalam KTT ASEAN-Tiongkok 8 Oktober

⁸⁰ *Laut Tiongkok Selatan*, Kementerian Luar Negeri Indonesia, diakses dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-RRT-Selatan.aspx> diakses pada 20 Maret 2017 pada 17.45 Wib

⁸¹ Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *Op.Cit*, hal. 5 – 6

2003 di Bali, kedua belah pihak menandatangani *Joint Declaration of the Heads of State/Government on Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. Pada hari yang sama, Tiongkok secara resmi menjadi negara non-ASEAN pertama yang menandatangani *TAC* dengan harapan mendorong negara itu untuk menyelesaikan sengketa di LCS secara damai dan menghindari pengancaman dan penggunaan kekerasan dalam menghadapi perselisihan antara kedua pihak.⁸²

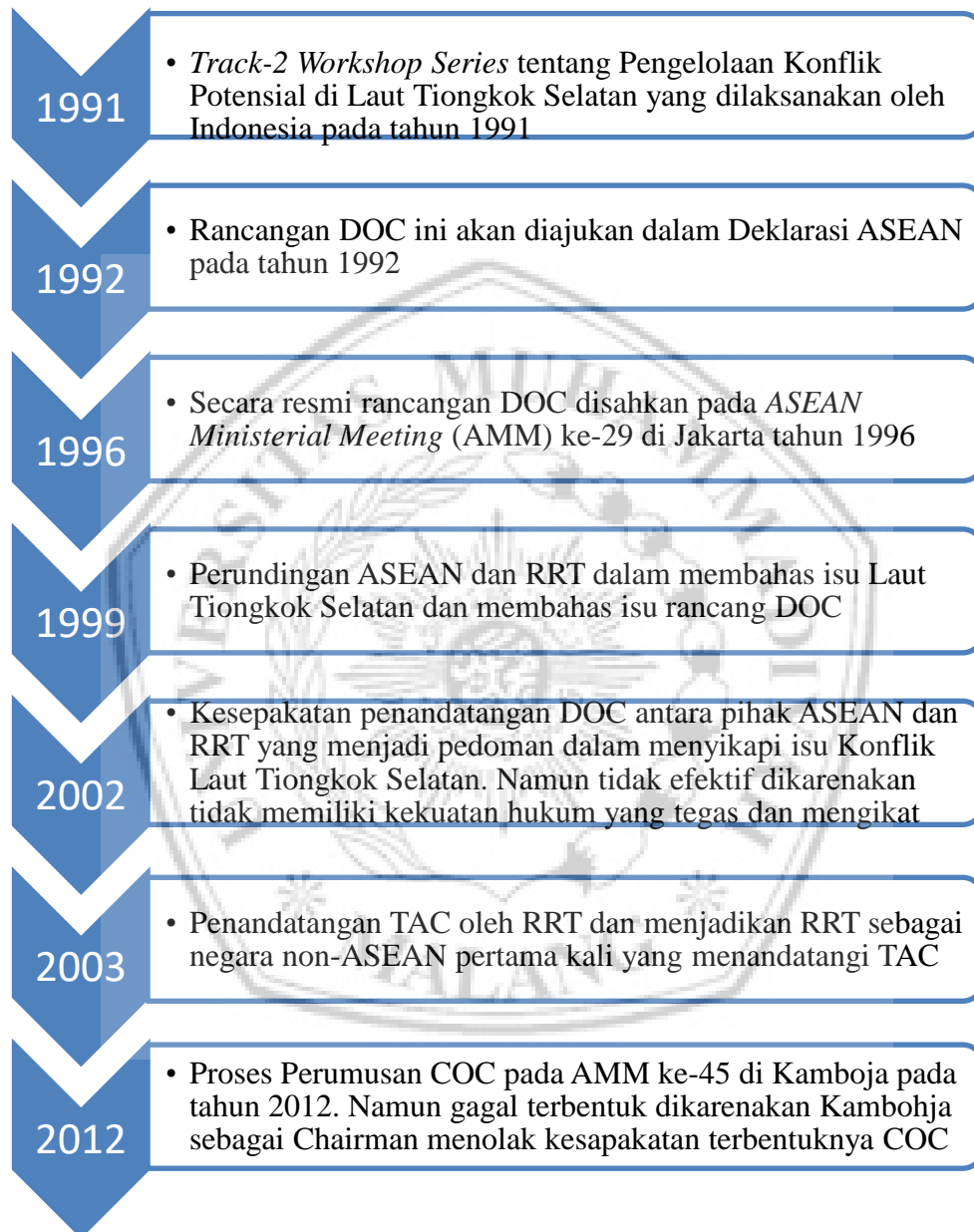
DOC pada sengketa Laut Tiongkok Selatan yang disepakati oleh pihak ASEAN dan Tiongkok tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat serta mengikat, akibatnya pihak-pihak yang terlibat sengketa di laut Tiongkok selatan khususnya Tiongkok tidak melaksanakan secara menyeluruh prinsip-prinsip DOC tentang konflik di Laut Tiongkok Selatan yang disepakati pada tahun 2002 tersebut, sebagai contoh RRT malah mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Tiongkok Selatan, selain itu Tiongkok juga menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat agresif terhadap pihak asing (kapal-kapal asing) yang melintasi kawasan Laut Tiongkok Selatan berupa penyerangan pada kapal-kapal tersebut.⁸³ Keluarnya regulasi serta tindakan-tindakan Tiongkok yang provokatif menunjukkan bahwa Tiongkok seakan-akan tidak menghormati DOC yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hal. 6 – 7

⁸³ Setyasih Harini, *Kepentingan Nasional RRT dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan*. Transformasi. Vol 14, No 21. 2011, hal. 46

⁸⁴ *Ibid*, hal. 43.

Skema 2.1. Upaya ASEAN dalam menangani Konflik di Laut Tiongkok Selatan



Maka dari itu banyak tuntutan untuk membentuk sebuah *Code of Conduct* (COC) yang merupakan perjanjian tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas serta mengikat. Jadi setiap pihak yang melanggar kesepakatan tersebut dapat di kenai sangsi. Namun keinginan ASEAN untuk menciptakan COC harus gagal dikarenakan adanya sikap penolakan dari Kamboja dalam proses pembentukan COC pada tahun 2012 pada KTT ASEAN yang dilaksanakan di Negara Kamboja.⁸⁵ Sikap penolakan yang dilakukan Kamboja menjadi babak baru dalam dinamika konflik di Laut Tiongkok Selatan pasalnya sikap Kamboja tersebut mempunyai dampak terhadap penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan yang akan di bahas pada pembahasan bab berikutnya.

2.5. Pendekatan RRT terhadap Negara ASEAN

Konflik sengketa wilayah yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan pada dasarnya terjadi karena setiap pihak menginginkan sebuah *power* dan potensi dari Laut Tiongkok Selatan itu sendiri. Dalam konflik tersebut setiap pihak mencoba semaksimal mungkin untuk mencapai kepentingannya. RRT sebagai Negara yang memulai klaim wilayah pada wilayah Laut Tiongkok Selatan melakukan beberapa pendekatan yang dapat dibagi menjadi menjadi dua bagian. Yang Pertama, RRT menggunakan pendekatan yang cenderung menggunakan sikap yang mengarah penggunaan fisik/ militer. Kedua, RRT menggunakan pendekatan secara

⁸⁵ Rizal Sukma, *ASEAN dan Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Kompas diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.RRT.Selatan> diakses pada 20 Maret 2017 pada 18.45 Wib

diplomatis/ bernegosiasi kepada pihak yang bersengketa/ tidak (Negara ASEAN yang tidak terlibat).

Pertama, pendekatann RRT dalam menyikapi konflik sengketa pada Laut Tiongkok Selatan cenderung mengarah pada penggunaan kekerasan/ militer. Hal itu sangat wajar dikarenakan secara power dan kekuasaan secara keseluruhan RRT lebih unggul dibandingkan dengan Negara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam. Hal itu diperkuat dengan sikap RRT yang sering melakukan *show of force*. Adapun sikap *show of force* yang dilakukan oleh RRT adalah membangun pangkalan militer di wilayah sengketa, membangun landasan pacu udara, dan fasilitas pertahanan di wilayah sengketa. Selain itu RRT melarang diikuti mengancam agar pihak lain tidak beroperasi di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang cenderung menunjukkan pownya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak awal era 1970-an hingga sekarang RRT secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut Tiongkok Selatan guna mempertahankan sumber sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.⁸⁶

Tindakan *show of force* yang dilakukan oleh RRT seringkali menimbulkan ketegangan yang tinggi pada eskalasi kondisi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Sebut saja pada tahun 1974 merupakan yang terparah, adanya bentrokan militer antara RRT dan Vietnam untuk memperebutkan Kep. Paracel. Bentrokan tersebut

⁸⁶ Setyasih Harini. “Kepentingan Nasional RRT dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan”. Transformasi. Vol 14, No 21. 2011, hal. 46

terjadi kembali pada tahun 1988 di Kep. Spratly yang mengakibatkan banyak kapal Vietnam tenggelam serta tercatat setidaknya 70 pelaut tewas dan dinyatakan hilang di area wilayah sengketa. Manuver politik dari RRT semakin keras terkait klaim wilayah mereka di Laut Tiongkok Selatan dengan menyatakan untuk pemberhentian aktivitas eksplorasi oleh Negara lainnya dikawasan sengketa.⁸⁷

Ketegangan muncul lagi pada tahun 2009 dimana terjadi Insiden penembakan atas kapal survei AS *Impeccable* sehingga menyebabkan ketegangan antar kedua negara dan insiden tersebut menjadi pendorong campur tangan AS atas konflik di Laut Tiongkok Selatan. Selama ketegangan terjadi RRT terus meningkatkan kapasitas alutsista militer mereka, seakan-akan menunjukkan bahwa mereka ingin mengintimidasi pihak lainnya yang bersengketa dengan *power* yang mereka miliki.⁸⁸

Kedua, pendekatan yang dilakukan RRT yang selanjutnya adalah melalui cara diplomatik lebih tepatnya merujuk pada sebuah diplomatic *political delay* yaitu RRT melakukan pendekatan kepada Negara Asia Tenggara yang bersengketa dan tidak dengan tujuan untuk melakukan *delaying* isu di Laut Tiongkok Selatan. Hal itu terbukti sejak munculnya isu sengketa di Laut Tiongkok Selatan RRT selalu berusaha untuk membujuk Negara ASEAN yang tidak bersengketa untuk tidak mencampuri isu sengketa yang di Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan, untuk para pihak yang terlibat sengketa RRT bersikukuh untuk menyelesaikannya secara bilateral. Jadi hal tersebut menjadi hambatan bagi penyelesaian dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Hal itu terjadi tidak

⁸⁷ Akmal Akmal and Pazli Pazli, *Op.Cit.*, hal. 4

⁸⁸ *Ibid*, hal. 5

terlepas dari pengaruh RRT yang sangat besar dengan ASEAN dari segala bidang khususnya militer, ekonomi.⁸⁹

Selain itu RRT seakan-akan enggan untuk menerima segala macam keputusan arbitrase internasional. Selagi sengketa konflik sengketa di Laut Tiongkok Selatan masih belum menemui titik temu dan kesepakatan. RRT terus meningkatkan klaimnya di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengkokohkan klaim mereka, membangun reklamasi dan pangkalan militer di wilayah sengketa.

2.5.1. Pendekatan RRT terhadap Kamboja

Terkait isu sengketa Laut Tiongkok Selatan, RRT merupakan Negara yang paling domiinan dalam melakukan klaim atas wilayah disengketakan. Selain itu RRT melakukan banyak upaya demi melanggengkan kepentingan mereka di Laut Tiongkok Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh RRT adalah menerapkan strategi *ability to prevail* kepada Negara Kamboja. Negara-negara anggota ASEAN memiliki level hubungan kerjasama yang berbedabeda dengan Cina, baik dari segi politik maupun ekonomi. Cina menggunakan hubungan kerjasama ini untuk menjalankan strategi *ability to prevail* atau upaya untuk membujuk aktor-aktor target (*targeted actors*) yang merupakan Negara anggota organisasi internasional untuk mengubah keputusannya dengan berupaya meyakinkan dan menawarkan alternatif-alternatif lain yang lebih menguntungkan. Cina adalah salah satu negara mitra kerjasama ekonomi terpenting bagi ASEAN.

⁸⁹ M. Taylor Fravel, "RRT Strategy in The South RRT Sea", *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 3 (2011), hal. 297 - 299

Cina berusaha menggunakan strategi *ability to prevail* terhadap *targeted actor* yang dalam hal ini adalah Kamboja.⁹⁰

Level kedekatan suatu Negara dapat mempengaruhi tindakan yang diambil dalam menyikapi suatu isu tertentu. RRT sendiri merupakan Negara partner yang sangat penting bagi ASEAN dari segala aspek baik social dan ekonomi. Namun, level kedekatan Negara RRT dengan Negara anggota ASEAN tentunya tidak sama. Kamboja dapat dikatakan memiliki kedekatan yang harmonis dengan Negara RRT dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. RRT merupakan partner Kamboja demi mencapai kepentingan nasional. Kamboja merupakan Negara berkembang yang membutuhkan banyak pembangunan dan pengembangan. Tentu hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Kamboja sendiri. Maka dari itu Kamboja mencoba untuk meningkatkan kerjasama baik secara bilateral, multilateral maupun global.

Dalam perkembangan suatu Negara, ekonomi merupakan suatu factor yang dominan untuk menstimulus perkembangan dan pembangunan suatu Negara. Hal itu berlaku sama dengan Negara Kamboja. RRT merupakan salah satu Negara yang paling penting bagi Kamboja dari berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi RRT adalah Negara yang paling sering memberikan bantuan luar negeri kepada Negara Kamboja. Hal itu sudah dilakukan RRT sejak tahun 1997, RRT memberikan bantuan sebesar 6 juta US dollar kepada Kamboja terkait pengembangan isu keamanan nasional Kamboja. Bantuan RRT kembali terjadi

⁹⁰ Anak Agung, Wiwik Dharmiasih, Bagus Suya Widya Nugraha, “*Penyebab Kegagalan ASEAN dalam Penyusunan Code of Conduct Sengketa Laut Tiongkok*”, Jurnal hubungan Internasional: Unud, Vol.1 No.1, 2017, hal. 12

pada tahun 1999 218 juta US dollar kepada Kamboja, bantuan RRT tersebut merupakan bantuan cuma-cuma tanpa kepentingan pinjaman.⁹¹

Bantuan RRT kepada Kamboja selain bantuan dana tanpa kepentingan pinjaman, teknis untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas nasional Kamboja yang melibatkan banyak perusahaan asal RRT. Bantuan kembali diberikan oleh RRT pada tahun 2006 yaitu sebesar 600 juta US dollar. Pada tahun 2007 RRT menjadi Negara pendonor dana terbesar bagi Kamboja. Tidak membutuhkan waktu lama bagi RRT untuk menjadi partner utama dalam pemberian donor kepada Kamboja. Pada tahun 2009 RRT menjadi Negara pendonor terbesar bagi Kamboja pada tahun tersebut. Total dari bantuan RRT kepada Kamboja adalah 257 juta US dollar dari 950 juta US dollar bantuan asing yang datang kepada Kamboja pada tahun tersebut. Bantuan datang lagi pada tahun 2008 sebesar 214 juta US dollar.⁹² Progam bantuan RRT kepada Kamboja masih berlanjut sampai saat ini. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pengaruh RRT kepada Kamboja.

Selain sebagai Negara pendonor terbesar bagi Kamboja, RRT merupakan Negara investor asing terbesar di Kamboja. Investasi asing merupakan sebuah stimulus yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Investasi asing RRT kepada Negara Kamboja berada dalam berbagai aspek seperti kekayaan sumber daya alam, energy, agrikultur, pembangunan infrastruktur, wisata dan komunikasi.

⁹¹ Phou Sambath, "*Cambodia – China: Past, Present, Future*", IIMBA, College of Management, hal. 3

⁹² *Ibid.*, 4

Gambar 2.2. Investasi Asing Kamboja 1994 – 2012⁹³

Table II-2-1 Investments Approved by CDC by Major Countries (1994 - September 2012)

Million USD

Country	1994-2006 Total		2007	2008	2009	2010	2011	2012 1-9	1994-2012.9 Total	
		Rank								Rank
Cambodia	4,341	-	1,323	3,932	3,753	391	1,930	261	15,931	-
China	1,581	2	180	4,371	893	694	1,193	230	9,142	1
Korea	1,361	3	148	1,238	121	1,027	146	150	4,191	2
Malaysia	1,960	1	241	3	7	167	235	0	2,614	3
UK	107	11	26	6	0	0	2,238	25	2,429	4
USA	428	5	3	671	1	36	144	5	1,290	5
Vietnam	81	12	139	21	210	115	631	84	1,281	6
Taiwan	576	4	40	21	27	92	82	78	916	7
Thailand	384	6	106	74	178	2	0	120	866	8
Singapore	271	8	2	52	272	37	14	83	732	9
HKG	248	9	26	0	7	30	331	56	697	10
Russia	279	7	0	102	235	0	0	0	617	11
Israel	0	14	2	300	0	2	0	0	304	12
France	208	10	35	6	50	0	0	3	303	13
Japan	22	13	113	8	5	0	6	2	157	14
Others	269	-	305	84	127	222	393	26	876	-
Total	12,116	-	2,656	10,889	5,859	2,691	7,012	1,123	42,346	-

Source: CIB (CDC)

Selain itu RRT merupakan partner kerjasama perdagangan yang penting bagi Kamboja. Hal itu tidak terlepas adanya kesepakatan ASEAN dengan RRT terkait dengan perdagangan internasional yaitu ASEAN-RRT Free Trade Agreement. Pada tahun 2000 sampai 2010 setidaknya terjadi perputaran uang dari hasil perdagangan yang dilakukan sebesar 232 Milyar US dollar.⁹⁴ Sedangkan kerjasama bilateral perdagangan antara Kamboja sebesar 2,5 Milyar US Dollar pada tahun 2009 dan 5 Milyar US Dollar pada tahun 2017.⁹⁵

Selain bantuan dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Negara Kamboja. RRT juga berperan dalam bantuan segi militer. RRT memberikan

⁹³ The Council for Development of Cambodia (CDC), “*Cambodia Investment Guide Book*”, 2013, hal. 24

⁹⁴ Pheakdey Heng Cambodia–China Relations: A Positive-Sum Game?, in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31, 2, 57-85., 2012, hal. 6

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 61

bantuan militer kepada Kamboja dalam berbagai bentuk seperti amunisi senjata, latihan bersama, pembaruan transportasi militer, dan peralatan militer lainnya. Biaya bantuan RRT kepada Kamboja dalam bidang militer tersebut senilai dengan 1,5 Juta US dollar.⁹⁶ Pada tahun 2010 Kamboja mendapat bantuan dari RRT berupa 257 mobil militer terbaru, 50.000 seragam dan dana untuk pengembangan militer sebesar 15 Juta US dollar. Bantuan militer selanjutnya terjadi pada tahun 2012 dimana RRT dan Kamboja menyepakati kerjasama militer terkait pembangunan infrastruktur pendidikan tentara dan rumah sakit bagi militer sebesar 20 juta US dollar.⁹⁷ Pada saat ini Kamboja merupakan partner terdekat RRT diantara Negara ASEAN lainnya. Kedekatan Kamboja – RRT terus akan berlanjut demi kepentingan bersama. Hal itu sejalan dengan pernyataan Kedutaan Besar RRT di Kamboja yang pernah mengatakan “China and Cambodia will always be good neighbours, close friends, trusted partners and dear brothers” (*The Phnom Penh Post* 2011).⁹⁸

Dengan adanya kedekatan RRT dan Kamboja tersebut. Jadi sangat mudah RRT untuk melakukan strategi *ability to prevail* kepada Kamboja mengingat betapa besarnya pengaruh RRT terhadap Kamboja. Dimana pendekatan RRT terhadap Kamboja sangat besar kemungkinannya mempengaruhi tindakan Kamboja dalam memandang isu di Laut Tiongkok Selatan. Mengingat besarnya kepentingan RRT dalam Laut Tiongkok Selatan. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Salah satu diplomat Senior Singapura, Kishore Mahbubani (2012), menyatakan bahwa hampir semua negara anggota ASEAN menganggap posisi

⁹⁶ Ibid, hal. 66

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid. 67

Kamboja dalam ASEAN *Ministerial Meeting* tahun 2012 adalah hasil dari tekanan besar yang diberikan oleh RRT.⁹⁹ Hal itu terbukti terhadap sikap penolakan Kamboja atas pembentukan COC (*Code of Conduct*) pada AMM ke-45 yang diadakan di Kamboja pada tahun 2012, dimana hal itu merupakan kejadian bersejarah dimana ASEAN gagal menciptakan sebuah *joint communiqué* untuk pertama kalinya semenjak ASEAN terbentuk sejak tahun 1967.¹⁰⁰ Padahal pembentukan COC sangatlah urgen dan penting sebagai solusi dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan antara Negara ASEAN – RRT. Selain itu upaya *ability to prevail* yang dilakukan oleh RRT terhadap Kamboja terbukti dengan adanya permintaan dari RRT kepada Kamboja untuk tidak membahas isu Laut Tiongkok Selatan pada pertemuan AMM ke-45 di tahun 2012 tersebut.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong yang menyatakan “*I requested that we issue the joint communique without mention of the South China Sea dispute ... but some member countries repeatedly insisted to put the issue of the Scarborough Shoal*” yang menunjukkan adanya perintah dari otoritas yang lebih tinggi yang mencoba mengintervensi jalannya pembentukan COC Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2012.¹⁰¹ Selain itu banyak diplomat yang berpendapat bahwa RRT membeli suara Kamboja dalam pertemuan tersebut. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Yang Jiechi selaku

⁹⁹ Anak Agung, Wiwik Dharmiasih, Bagus Suya Widya Nugraha, *Op.Cit.*, hal. 12

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 7

101

BBC News, “*Asean nations fail to reach agreement on South China Sea*” diakses pada <https://www.bbc.com/news/world-asia-18825148> pada 28 November 2018 pukul 21.57 Wib

Menteri Luar Negeri RRT yang menyatakan ucapan terimakasih kepada Kamboja telah menjaga kepentingan utama dari RRT di Laut Tiongkok Selatan.¹⁰²

2.3.Dampak Sikap Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan COC (*Code of Conduct*) dalam upaya Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan

Mengingat konflik di Laut Tiongkok Selatan tak kunjung menemui titik terang. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan. ASEAN sebagai organisasi regional juga berupaya untuk memberikan pemecahan masalah yang terbaik dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan dengan berusaha untuk menciptakan COC pada tahun 2012, namun hal itu gagal dikarenakan adanya sikap penolakan oleh Kamboja. Sikap penolakan Kamboja dalam proses pembentukan COC konflik di Laut Tiongkok Selatan memberikan dampak pada proses penyelesaian konflik sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Adapun dampak tersebut adalah konflik sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang terus berkepanjangan dikarenakan masih mendapatkan solusi yang konkrit atau menemui titik buntu.¹⁰³

Selain itu sikap penolakan Kamboja tersebut memberikan keretakan dalam organisasi ASEAN yang dapat menimbulkan perpecahan dalam ASEAN itu

102

Jane Perlez, "Asian Leaders at Regional Meeting Fail to Resolve Disputes Over South China Sea" diakses pada <https://www.nytimes.com/2012/07/13/world/asia/asian-leaders-fail-to-resolve-disputes-on-south-china-sea-during-asean-summit.html> pada 28 November 2018 pukul 22.01 Wib

103

Manuel Mogato, Michael Martina, Ben Blanchard, "ASEAN deadlocked on South RRT Sea, Cambodia blocks statement" diakses dalam <https://www.reuters.com/article/us-southRRTsea-ruling-asean/asean-deadlocked-on-south-RRT-sea-cambodia-blocks-statement-idUSKCN1050F6> pada 24 September 2018 pukul 08.00 wib

sendiri. Dimana sikap penolakan Kamboja pada proses pembentukan COC pada tahun 2012 mendapat banyak protes dan kritikan keras dari berbagai pihak Negara ASEAN lainnya. Banyak pihak menuduh bahwa keterpihakan Kamboja kepada RRT tidak terlepas dari pengaruh RRT kepada Kamboja yang sangat mendasar dari berbagai bidang khususnya ekonomi.¹⁰⁴ Tentu tindakan Kamboja yang tidak sesuai TAC dalam penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan, menjadi sebuah hambatan bagi upaya ASEAN untuk memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan tersebut. Selain itu sikap Kamboja tersebut juga dapat mengancam keutuhan ASEAN, mengingat tindakan Kamboja menimbulkan banyak reaksi khususnya kecaman dari Negara yang bersengketa.

¹⁰⁴ Sovinda Po & Veasna Var, “*Cambodia’s South RRT Sea Dilemma Between RRT and ASEAN*” diakses dalam <https://ippreview.com/index.php/Blog/single/id/425.html> pada 24 September 2018 pukul 08.10. Wib